

Peran Pesantren dalam Mencegah Gerakan Radikalisme di Kalimantan Barat

(The Role of Islamic Boarding Schools in Preventing the Radicalism Movement in West Kalimantan)

Syaiful Ilmi¹, Ardiansyah^{1*}

¹ Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Pontianak, Indonesia

*Corresponding email: ardiansera@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v15i1.3378>



ABSTRACT

Kata Kunci:
AGIL; Islamic Boarding School; Radicalism

Islamic boarding schools are naturally known as reputable Islamic educational institutions that consistently breeds inclusive and tolerant values. However, radicalism in the name of religion has become increasingly common in Indonesia. This study aims to analyze the strategy used by the Islamic boarding schools in West Borneo in countering the radicalism movement with the AGIL paradigm. This study uses the phenomenological approach and considered four objects, which are: Darul Khairat Islamic Boarding School, Makarim al-Akhlaq Islamic Boarding School, Darul Ulum Islamic Boarding School and Darussalam Islamic Boarding School. The results reveal that Islamic boarding schools apply the following strategies which are: internalizing Sufistic teachings, applying salaf education, instilling the Ahlu Sunnah wa al Jama'ah doctrine, and instilling the values of tolerance and pluralist attitudes.

ABSTRAK

Article Info:
Submitted:
06/03/2020
Revised:
11/06/2020
Published:
30/06/2020

Pesantren yang secara alami merupakan lembaga pendidikan Islam yang secara konsisten menyemai nilai-nilai inklusif dan toleran. Namun demikian, gerakan radikalisme atas nama agama semakin massif terjadi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pesantren di Kalimantan Barat dalam menanggulangi gerakan radikalisme dengan paradigma AGIL. Pendekatan fenomenologi digunakan dalam penelitian ini dengan objek empat pesantren, yaitu Pondok Pesantren Darul Khairat, Pondok Pesantren Makarim al-Akhlaq, Pondok Pesantren Darul Ulum dan Pondok Pesantren Darussalam. Hasil penelitian ini menemukan bahwa beragam strategi diterapkan oleh pondok pesantren, yaitu strategi internalisasi ajaran sufistik, menerapkan pendidikan salaf, menanamkan doktrin *Ahlu Sunnah wa al-Jama'ah*, dan menanamkan nilai-nilai toleransi dan sikap pluralis.

PENDAHULUAN

Peran pesantren baik sejak pra-kemerdekaan maupun pasca kemerdekaan telah menempatkan pesantren sebagai salah satu aset penting bagi bangsa Indonesia. Keberhasilan kaum santri menghadapi tantangan kolonialisme menjadikan pesantren

bukan hanya sebagai wadah pendidikan karakter dan agama saja, melainkan juga sebagai wadah bagi generasi bangsa dalam merawat keutuhan NKRI. Namun, dalam konteks yang berbeda, keberadaan pesantren hari ini dihadapkan pada berbagai problem yang lebih kompleks yang sedang dihadapi oleh Indonesia, misalnya, persoalan pengentasan kemiskinan, persoalan meningkatnya angka korupsi, krisis budaya dan kebangsaan, dekadensi moral dan—sebagai *concern* penelitian ini—merebaknya paham radikalisme (Bakri, 2014; Suprihatiningsih, 2012). Dalam kasus yang terakhir, merebaknya paham radikalisme, pesantren—meminjam bahasa KH. Abdrrahman Wahid (Gus Dur)—sebagai lembaga pendidikan yang bersifat “sub-kultur” dalam konteks penanaman nilai-nilai agama, sedang diuji dengan masifnya kelompok yang bertindak radikal (Wahid, 2001). Tantangan pesantren terhadap masifnya gerakan radikalisme ini bukan tanpa alasan mengingat bahwa selama ini pesantren dikenal sebagai salah satu garda terdepan dalam persoalan nilai-nilai deradikalisasi.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Wahid Institute (2017), kasus radikalisme dan intoleransi atas nama agama masih bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun. Menurut laporan yang dirilis pada tahun 2014, angka kasus radikalisme dan pelanggaran intoleransi agama cenderung menurun sebesar 42 persen sebesar 158 peristiwa dengan 187 tindakan. Berbeda dengan Wahid Institute, Komnas HAM RI (2017) menunjukkan hal sebaliknya di mana kasus radikalisme dan intoleransi beragama menunjukkan peningkatan. Berdasarkan pengaduan yang diterima Komnas HAM, sepanjang 2016 tercatat ada 97 kasus, sedangkan pada 2015 tercatat ada 87 kasus dan pada 2014 hanya 76 kasus.

Penyebaran paham radikalisme ke seluruh penjuru Indonesia ini seakan-akan sudah tidak bisa dihentikan, termasuk diantaranya di wilayah Kalimantan Barat. Dalam tiga tahun terakhir, tindakan radikalisme atas nama agama di Kalimantan Barat mengalami akselerasi yang cukup masif. *Pertama*, masuknya kelompok Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang berakhir dengan pengusiran eks jamaah tersebut yang terjadi pada 19 Januari 2016 (Panji & Antara, 2017). *Kedua*, kasus persekusi terhadap tokoh agama yang menimpa Tengku Zulkarnain dan Ustadz Sobri Lubis pada tahun 2017 yang melahirkan gerakan Aksi Bela Ulama 205 pada Festival Gawai Dayak pada 20 Mei 2017. Peristiwa tersebut sempat memicu ketegangan karena di antara kedua pihak ada yang membawa senjata tajam (Sitepu, 2017). *Ketiga*, berdasarkan data yang dihimpun oleh pihak Kepolisian, setidaknya ada 17 orang yang diduga terlibat sebagai partisipan gerakan *Islamic State of Iraq and al-Sham* (ISIS) di Kalimantan Barat (“Kepolisian Mendata Ada 17 Orang Tempo,” 2017).

Di antara peran strategis pesantren saat ini adalah peran pemberdayaan (*empowerment*) dan transformasi *civil society* secara efektif. Bahkan pesantren berfungsi sebagai satu elemen determinan dalam struktur sosial masyarakat Indonesia. Mahfudh (1994) mengungkapkan bahwa pesantren merupakan cerminan perpaduan antara pesantren dan lingkungan sosial serta memberikan kontribusi yang signifikan

terhadap perubahan sosial. Fenomena kasus radikalisme tersebut merupakan fakta yang sangat merisaukan bagi masyarakat Kalimantan Barat. Kontribusi pesantren dalam penyelesaian problem radikalisme ini merupakan salah satu upaya yang sedang ditunggu oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, penelitian ini dianggap urgen penulis lakukan untuk menemukan peran dan format strategi yang dilakukan oleh pondok pesantren yang ada di Kalimantan Barat dalam mencegah merebaknya paham radikalisme dengan harapan penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praksis bagi pihak terkait.

Beberapa studi terkait radikalisme adalah sebagai berikut. [Rahman \(2006\)](#) mengungkapkan bahwa akar gerakan Islam yang ada di Indonesia merupakan gerakan Islam yang diinspirasi oleh ideologi gerakan Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) yang berfokus pada tiga target utama; Perguruan Tinggi, Pesantren dan Masjid. [Al-Zastrouw \(2004\)](#) menambahkan bahwa fenomena Islam radikal, seperti FPI misalnya, merupakan gerakan Islam yang sarat kepentingan pihak tertentu.

[Hasan \(2016\)](#) menjelaskan bahwa salah satu faktor pendukung munculnya gerakan radikal pada masa awal reformasi merupakan efek dari rasa kecewa dan frustrasi dari sulitnya lapangan pekerjaan yang tersedia di mana dalam konteks ini gerakan radikalisme yang ada lebih disebabkan oleh faktor ekonomi. Pertanyaan ini sejalan dengan [Asrori \(2015\)](#) yang mengungkapkan bahwa gerakan radikalisme yang muncul di Indonesia disebabkan oleh tiga faktor, yaitu (1) faktor di tataran global sebagaimana fenomena Arab Spring, (2) tersebar luasnya paham wahabisme, dan (3) faktor ekonomi dan kemiskinan.

Lain daripada itu, [Syarif \(2010\)](#) mengungkapkan fakta bahwa sejumlah besar pesantren di Indramayu, Cirebon, Kuningan, Majalengka, Ciamis dan Pangandaran masih mengembangkan paham keagamaan yang sejalan dengan cita-cita kelompok radikal. [Mukodi \(2015\)](#) menambahkan bahwa gerakan radikalisme di Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Pacitan pada khususnya lebih dikarenakan oleh faktor kemiskinan, korupsi, globalisasi, dan sejarah. Oleh karena itu, menyikapi gerakan radikalisme tersebut, Pondok Pesantren Termas hadir sebagai lembaga pendidikan yang konsisten menyemai nilai-nilai deradikalisasi dari masa ke masa.

Lebih lanjut, sejauh pengamatan peneliti, belum ditemukan studi yang membahas secara spesifik mengenai peran dan langkah konkrit pesantren dalam hubungannya dengan perkembangan gerakan radikalisme yang ada di Kalimantan Barat. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis lebih jauh tentang radikalisme dan perkembangan radikalisme di Kalimantan Barat dan langkah-langkah dan strategi pesantren yang ada di Kalimantan Barat dalam membendung dan menanggulangi maraknya gerakan radikalisme yang terjadi.

KERANGKA TEORI

Penelitian ini mengacu pada teori struktural-fungsionalisme. Teori tersebut digunakan untuk menemukan peran konkrit pesantren dalam menanggulangi gerakan radikalisme. Teori ini digunakan didasarkan pada besarnya kontribusi pesantren terhadap rekayasa fenomena sosial yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Sejak awal kelahirannya, pendekatan fungsional yang dikembangkan oleh salah satu murid Durkheim, Radcliffe-Brown, lebih pada kontribusi sosial yang dimainkan oleh sebuah perangkat sosial, atau sebuah institusi sosial—dalam konteks ini adalah pondok pesantren—terhadap kemantapan suatu struktur sosial (Marzali, 2006).

Dalam konteks yang lebih jauh, sebuah lembaga sosial dapat menjalani peran “fungsional”—sebagaimana yang dikembangkan oleh Talcott Parsons—apabila bisa memenuhi empat standar dasar, yaitu adaptasi (*adaptation*), pencapaian tujuan (*goal attainment*), integrasi (*integration*) dan pemeliharaan pola (*latency*). Empat konsep dasar tersebut disebut dengan paradigma A.G.I.L. Melalui keempat konsep tersebut, penulis akan melihat lebih jauh bagaimana peran dan langkah konkrit pesantren dalam membendung aksi radikalisme di Kalimantan Barat (Parson & Hamilton, 2001).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan model kualitatif dengan penelitian lapangan yang dikolaborasikan dengan temuan pustaka. Untuk mencapai tujuan penelitian, penulis menggunakan pendekatan fenomenologi. Data primer diperoleh dari sumber informan yaitu segenap *civitas* pesantren baik pengasuh pesantren, pengurus pesantren maupun santri dan masyarakat di sekitar pesantren. Data diperoleh dengan teknik wawancara, observasi dan studi pustaka dari lima objek penelitian, yaitu Pondok Pesantren Darul Khairat di Kota Pontianak, Pondok Pesantren Makarim al-Akhlaq di Kota Singkawang, Pondok Pesantren Darul Ulum di Kabupaten Kubu Raya dan Pondok Pesantren Darussalam Sengkubang di Kabupaten Mempawah. Lebih lanjut, data dianalisis dengan teknik deskriptif-analitik melalui proses reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Diskursus Perkembangan Makna Radikalisme

Makna kata *ath-tharruf* atau radikalisme pada masa ke masa mengalami perkembangan makna. Perkembangan makna *ath-tharruf* yang digunakan oleh bangsa Arab sejak zaman pra Islam dan saat ini cukup berbeda. Kata *ath-tharruf* pada masa pra Islam, sudah digunakan oleh bangsa Arab dan bisa dilacak melalui syair-syair yang digunakan pada masa tersebut. Pengambilan kosa kata melalui syair dikarenakan syair Arab memiliki catatan dan periwayatan, sehingga otentisitas maknanya dapat terjaga. Di antara penyair yang menggunakan derivasi *ath-tharruf* yaitu *ath-tharf* adalah Umru'ul Qais dalam puisinya yang berbunyi:

ورحنا يكاد الطرف يقصر دونه # متى ما ترقى العين فيه تسفل

Kata ini juga bermakna المكتسب المحدث. Berikut bait syairnya:

أو الخضر لم يمنع من الموت ربه # وكان ذا مال, طريف, وتالد. (Sulma, 2008)

Pada masa Islam kata *at-tatharruf* bisa dilihat dari penggunaan kata tersebut dalam al-Quran. Kata *at-tatharruf* atau derivasinya disebut 11 kali dalam al-Quran, yaitu dalam QS. ash-Shafat (37): 48, QS. Shaad (38): 52, QS. asy-Syura (42): 45, QS. ar-Rahman (55): 56, QS. an-Naml (27): 40, QS. Ibrahim (14): 43, QS. Ali Imran (3): 127, QS. Hud (11): 114, QS. Thaha (20): 130, QS. ar-Ra'd (13): 41, dan QS. Al Anbiya (21): 44 (Al-Baqi, 1992).

Secara istilah kata *at-tathaqqurf* mempunyai beberapa pendapat, diantaranya adalah berlebih-lebihan dalam berakidah, berfikir, bermazhab, atau lainnya dengan mengutamakan agama, kelompok jamaah, atau partai (Shawi, 1993). Pendapat lain, *at-tathaqqurf* adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan kepada yang bertentangan, baik itu berupa tambahan maupun pengurangan. *At-tatharruf* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu radikalisme perorangan (*at-tatharruf' al-afrad*), radikalisme kelompok (*at-tatharruf' al-jama'at*) dan radikalisme bernegara (*at-tatharruf ad-daulah*) (Utsman, 2017).

Dalam sejarah Islam, akar radikalisme dapat ditelusuri pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, yang dimana terjadi gerakan secara massal yang menginginkan perubahan pemerintahan oleh kelompok Khawarij. Kaum Khawarij menggunakan jalan kekerasan demi memuluskan tujuannya sehingga menimbulkan ketakutan umat muslim pada masa itu. Awal kekerasan ini berlanjut sehingga terjadi banyak peperangan pada masa kekhalifahan berikutnya seperti kekhalifahan Bani Umayyiah dan Abbasiyah (Sinaga, Ramelan, & Montratama, 2008). Sejarah tersebut menunjukkan bahwa radikalisme agama telah hadir pada masyarakat Islam. Tapi, sebetulnya tidak hanya Islam yang dirasuki oleh ruh radikalisme, namun juga agama lainnya seperti Kristen (Humaidi, 2008).

Dewasa ini, istilah radikalisme juga sering dilekatkan dengan paham Wahabi atau Salafi yang melakukan berbagai tindakan kekerasan. Sebut saja seperti tuduhan melakukan pembunuhan terhadap sejumlah ulama Aswaja, melakukan aksi perusakan makam Nabi, dan berbagai kegiatan sejenis lainnya (Tim Cahaya Nabawi, 2017). Pendapat di atas menunjukkan adanya eksistensi radikalisme agama, sehingga Kazhim el-Kholisi menelurkan beberapa faktor-faktor penyebab munculnya radikalisme agama, yaitu (1) faktor sejarah (*al-amil at-tarikhi*), (2) faktor politik (*al-amil as-siyasi*), dan (3) faktor ekonomi (*al-amil al-iqtishadi*).

Namun, radikalisme agama dibantah secara keras oleh tokoh sarjana muslim Indonesia, yang justru mengatakan bahwa agama bukanlah faktor tunggal kekerasan dan terorisme, namun merupakan kolaborasi antara faktor ekonomi, sosial, dan politik. Aksi radikalisme menurutnya selalu bersifat situasional. Islam tidaklah

penyebab terorisme. Begitu juga dengan agama-agama yang lain yang tidak terkait dengan tindakan kekerasan dan terorisme yang dilakukan dengan kelompok yang memeluk agama tersebut (Azra, 2016).

B. Radikalisme di Indonesia dan Kalimantan Barat

Sebagai sebuah negara dengan keberagaman masyarakatnya, Indonesia merupakan sebuah negara yang berdaulat memiliki sejarah panjang mengenai radikalisme. Awal radikalisme di Indonesia telah tampak pada gerakan DI/TII (Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia) pada masa 1950-an. Fenomena radikalisme di Indonesia selanjutnya pada masa Orde Baru mendapatkan tekanan berat, karena pada masa ini pemerintah Indonesia melalui tangan Soeharto selalu membatasi habis radikalisme, baik kanan maupun kiri. Pada masa itu, radikalisme merupakan *common enemy*, sebut saja gerakan Komando Jihad pada tahun 1980-an yang akhirnya hilang tanpa jejak. Namun gerakan radikal terus bermunculan hingga lahir Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

Setelah era reformasi, gerakan-gerakan radikalisme kembali muncul dan tumbuh subur di Indonesia bahkan pemerintah harus mendirikan sebuah badan khusus untuk menangkal gerakan tersebut, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang bekerjasama dengan Kementerian Agama. Penanggulangan radikalisme nampaknya mendapatkan dukungan oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun rakyat Indonesia dewasa ini. Pemerintah melalui tangan-tangan kementeriaannya selalu memprogramkan gerakan-gerakan deradikalisme, baik berupa seminar-seminar, workshop, maupun berbagai bentuk kampanye lainnya.

Akar gerakan radikalisme di Indonesia, menurut Ummah (2012) disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu (1) munculnya tekanan politik pemerintah, (2) faktor emosi keagamaan, (3) faktor kultural, dan (4) faktor ideologis anti-westernisme, (5) kebijakan pemerintah, dan (6) faktor media massa atau pers. Kalimantan Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai keberagaman sehingga juga mempunyai peluang masuknya paham radikalisme. Beberapa faktor yang menjadi peluang terjadinya aktivitas radikalisme di Kalimantan Barat adalah letak geografis Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia yang juga berbatasan dengan Filipina dan Thailand. Selain itu, Kalimantan Barat memiliki etnis yang beragam sehingga menjadi daerah yang rawan konflik sebagaimana yang terjadi pada tahun 1997 dan 1999 saat terjadi konflik antara suku Dayak dengan Madura.

Dalam konteks kasus radikalisme agama di Kalimantan Barat, bisa dilihat dari beberapa kasus yang sebenarnya muncul belakangan dibanding kasus di atas. Salah satunya dapat dilihat dari kasus penyerangan dan pembakaran terhadap anggota Gerakan Fajar Nusantara pada tahun 2016 yang berlokasi di daerah Mempawah. Anggota Gafatar yang mengalami tindakan pengusiran tersebut

berjumlah 1.124 orang. Menurut keterangan yang penulis himpun, gerakan massa yang melakukan penyerangan terhadap anggota Gafatar tersebut didorong oleh isu mengenai faham-faham keagamaan yang berujung pada indikasi kesesatan organisasi Gafatar tersebut. Menurut Solihin, salah satu tokoh agama di Mempawah, menyatakan bahwa kesesatan Gafatar tersebut benar-benar tampak dan nyata dengan melihat pada buku-buku rujukan keagamaan mereka yang menyatukan antara ajaran Islam, Kristen dan Yahudi.

Kasus lainnya adalah kasus ‘persekusi dan penghinaan ulama’ yang dilakukan Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Sintang Kalimantan Barat yang menolak kedatangan Tengku Zulkarnain dan Ustadz Sobri Lubis pada tahun 2017. Kasus tersebut mendorong lahirnya Aksi Bela Ulama yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2017, atau yang dikenal dengan Aksi 205. Aksi yang dilaksanakan bersamaan dengan Pekan Gawai Dayak tersebut bahkan hampir menciptakan konflik horizontal antara masyarakat etnis Dayak dan peserta Aksi Bela Ulama. Aksi tersebut jika dilihat secara eksplisit, maka polanya hampir sama dengan gerakan yang terjadi di Jakarta seperti Aksi 114 dan Aksi 212 yang dilandasi oleh Gerakan Bela al-Qur’an.

Gerakan bela al-Qur’an yang terjadi di Jakarta memang memberikan pemantik terhadap lahirnya gerakan Islam yang lebih radikal di Kalimantan Barat. Selain mengikuti pola aksi yang terjadi di Jakarta tersebut, salah satu gerakan lainnya yang memiliki indikasi kuat terhadap relasi gerakan Islam radikal di Jakarta dengan di Kalimantan Barat dapat dilihat dari terbentuknya Gerakan Masyarakat Kalbar Untuk Jakarta, GMK-UJ. Pada poin ini dapat dilihat jika gerakan radikalisme agama yang mulai tumbuh di Kalimantan Barat pada dasarnya bukan merupakan tindakan yang secara *genuine* berakar dari kultur masyarakat Kalimantan Barat sendiri.

Berdasarkan contoh kecil dua kasus di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kemungkinan lahirnya konflik horizontal di kalangan masyarakat Kalimantan Barat tidak lagi hanya terbatas pada gesekan etnis sebagaimana stigma yang selalu melekat untuk masyarakat Kalimantan Barat sendiri. Konflik horizontal tersebut hari ini juga dapat didorong oleh eksistensi keberadaan gerakan radikalisme atas nama agama yang mulai tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat Kalimantan Barat. Hal ini tentu merupakan salah satu pekerjaan rumah baik bagi pemerintah, pusat dan daerah, maupun lembaga-lembaga keagamaan, dalam hal ini pondok pesantren.

C. Pondok Pesantren: Antara Pendidikan Inklusif dan Kemunculan Gerakan Radikalisme Agama

Pondok pesantren yang telah berkembang berabad-abad lamanya di Indonesia merupakan Lembaga Pendidikan yang memiliki ciri khas. Maka tidaklah berlebihan ketika pondok pesantren, dalam tinjauan sejarah pendidikan, dipandang sebagai

indogeneous culture, yakni salah satu unsur kebudayaan asli yang tumbuh dan berkembang di Nusantara (Saleh, 1988). Sebagai sebuah hasil kebudayaan, Gus Dur mengajukan tesis bahwa pondok pesantren dapat digolongkan ke dalam sub-kultur yang memiliki ciri khas yang berbeda dengan lembaga-lembaga pendidikan di luar pesantren (Wahid, 2001).

Sementara Cak Nur memandang kekhasan pondok pesantren dalam tiga hal, yaitu ke-Islaman, ke-Indonesiaan, dan keilmuan (Yasmadi, 2002). Selain faktor kepemimpinan, kitab-kitab klasik yang jadi rujukan dan sistem nilai, kekhasan pondok pesantren juga melekat dalam sistem pengajarannya. Ada beberapa metode pembelajaran yang dikembangkan di pesantren, yaitu metode *bandongan* atau sistem layanan kolektif (*collective learning process*). Metode yang kedua disebut dengan metode *sorogan* atau layanan individual (*individual learning process*) (Muhajir, 2014). Kedua metode tersebut merupakan metode pembelajaran yang telah berlangsung sejak lama. Namun, akulturasi sistem pendidikan modern akhir-akhir ini turut mempengaruhi model pendidikan pondok pesantren, di mana pada umumnya pondok pesantren sudah menggunakan sistem kelas dan tingkat, seperti tingkat *Ūla*, *Wustā* dan *‘Ulyā*.

Pandangan lain yang melekat dalam karakteristik pondok pesantren adalah proses menanamkan nilai-nilai Islam yang *rahmatan li al-‘alamīn*. Dalam konteks ini, pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang memang memegang teguh prinsip inklusivisme Islam (Maunah, 2009). Dalam cara pandang yang inklusif, seseorang cenderung menerima perbedaan, meskipun tidak sependapat dengan kebenaran orang lain. Sikap inklusif ini dapat diartikulasikan sebagai sikap menerima yang toleran terhadap adanya perbedaan (Panikkar, 1994). Dalam watak inklusivisme, tidak muncul rasa kecurigaan apalagi permusuhan, melainkan sikap akomodatif (Sachedina, 2004).

Sikap inklusif tersebut telah menjadi ciri khas pondok pesantren selama berabad-abad. Doktrin inklusif ini mendorong sikap pondok pesantren yang dapat menerima keselarasan antara Negara dan Pancasila, antara peraturan syari’at dan Undang-Undang Dasar, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan lain sebagainya. Maka dari itu, tidak heran ketika pondok pesantren selama ini dianggap sebagai lembaga pendidikan Islam yang mampu mengcounter paham-faham radikalisme, ekstrimisme atau bahkan terorisme, karena pondok pesantren merupakan simbol toleransi yang menjadi salah satu kearifan lokal (*local wisdom*) bangsa ini. Berdasarkan pandangan di atas, tidak berlebihan ketika Khamami Zada menyatakan bahwa salah satu karakter otentik yang ada pada pondok pesantren yaitu jauh dari kekerasan. Pondok pesantren lebih menekankan pada tradisi cinta damai dan toleran (Hanafi, 2018). Namun demikian, salah satu pertanyaan besar adalah apakah mungkin radikalisme agama itu dapat lahir rahim pondok pesantren?,

mengingat bahwa salah satu akar gerakan radikalisme agama adalah pemahaman akan Islam yang tidak secara *kaffah* (baca: komprehensif).

Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) bahkan menyebut ada 19 pondok pesantren di Indonesia yang terindikasi menjalankan gerakan Islam radikal (Al-Faqir, 2016). Salah satunya yang sering dikait-kaitkan dengan gerakan Islam radikal adalah pondok pesantren al-Mukmin Ngruki, Solo (Tan, 2011). Menurut Sidney Jones, Pesantren al-Mukmin Ngruki memiliki andil yang cukup besar dalam memperlebar jangkauan kelompok Islam radikal yang ada di Indonesia yang dalam hal ini juga disokong oleh jejaring Islam radikal di luar negeri, dalam hal ini adalah jaringan al-Qaeda (Najib, 2013). Pesantren lainnya adalah Pondok Pesantren al-Islam Lamongan. Pondok Pesantren ini merupakan salah satu pondok pesantren yang terlibat aksi terorisme di Bali pada 12 Oktober 2002 silam. Selain Pondok Pesantren al-Mukmin Ngruki dan Pondok Pesantren al-Islam Lamongan tersebut, ada juga pondok pesantren di Yogyakarta yaitu Pondok Pesantren Ihya' al-Sunnah pimpinan Ja'far Umar Thalib yang sempat membentuk satu sayap gerakan jihadis yang dikenal dengan Laskar Jihad dan beberapa pesantren lainnya (Hasani & Naipospos, 2012).

Beberapa faktor yang mendorong kemungkinan pesantren sebagai tempat persemaian kelompok radikal adalah sebagai berikut: *pertama*, latar belakang pengetahuan agama pimpinan pesantren yang memiliki visi orientasi pemurnian dan proteksi bidang akidah yang lebih dekat dengan kelompok Salafi (Susanto, 2007). *Kedua*, kurikulum pesantren. Proses indokrinasi yang terjadi di pondok pesantren melalui tiga tahap, yaitu aktivitas sekolah (*the school's activities*), kurikulum keagamaan (*religious curriculum*), dan kurikulum yang tersembunyi (*hidden curriculum*) (Najib, 2013). *Ketiga*, jaringan sosial pengasuh pesantren seperti halnya jaringan al-Qaeda, Jamaah Islamiyah, atau bahkan ISIS. Beberapa faktor di atas, menurut Edi Susanto, mendorong kemungkinan yang sangat besar lahirnya gerakan radikalisme agama yang berasal dari pesantren (Susanto, 2007).

D. Strategi Pondok Pesantren di Kalimantan Barat dalam Membendung Gerakan Radikalisme Agama

1. Pondok Pesantren Darul Khairat

Pondok Pesantren Darul Khairat didirikan oleh Drs. KH. Suadi Mastur dan resmi didirikan pada 17 Rabi'ul Awwal 1419 Hijriah atau 12 Juni 1998 Masehi. Pada awalnya, pondok pesantren tersebut hanya memiliki lembaga pendidikan al-Qur'an yang memiliki enam orang santri. Saat ini, Pondok Pesantren Darul Khairat sudah memiliki Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan Madrasah Diniyah dengan jumlah santri sebanyak 801 orang.

Salah satu keunggulan Pondok Pesantren Darul Khairat adalah lembaga pendidikan salafnya melalui Madrasah Diniyah. Sampai saat ini, Madrasah Diniyah Darul Khairat sudah memiliki tiga jenjang tingkat, yaitu *Awwaliyah*,

Wustho dan *Ulya*. Keunggulan pondok pesantren tersebut dalam memahami khazanah keislaman tidak sebatas pada pendidikan Madrasah Diniyahnya saja, namun juga didorong oleh kegiatan ekstrakurikuler berupa *Bahtsu al-Masail* (BM). Menurut Ustadz Ruba'i, kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang diadakan oleh pondok pesantren untuk menemukan jawaban dari suatu pertanyaan atau menemukan solusi dari problematika keagamaan yang sedang dihadapi oleh masyarakat saat ini.

Lebih lanjut, strategi Pondok Pesantren Darul Khairat dalam membendung gerakan radikal atas nama agama dengan cara menghindari pemahaman tekstual terhadap persoalan-persoalan yang mendorong lahirnya gerakan radikal. Ustadz Atoullah menyatakan:

“kalau saya kira *sih* pak, strategi untuk membendung kelompok radikalisme yang kadang-kadang menggunakan nama agama itu ya harus dengan cara kembali pada agama itu sendiri. Caranya bagaimana? Ya dengan cara mempelajari agama jangan setengah-setengah. Belajar agama harus selesai sampai tuntas, harus sampai pada ujungnya. Kalau belajar agamanya *bener* maka pemahaman pada agamanya pasti juga *bener*. Baca Qur'annya *bener*, baca hadisnya *bener*, baca pendapat ulama juga *bener*. *Bener* di sini maksud saya itu pak faham dengan *bener*, tidak salah maksud, tidak salah tafsir. Kalau semuanya sudah *bener* pasti praktiknya juga *bener*. *Gak* mungkin *petantang-petenteng* seakan-akan pemahamannya saja yang *bener*, tidak mungkin dikit-dikit mengkafirkan orang, mengkafirkan mereka yang berbeda.”

Berdasarkan pandangannya di atas, maka salah satu konsentrasi yang dijaga oleh Pondok Pesantren Darul Khairat adalah kurikulum pendidikan agama. Di pondok pesantren tersebut para santri dibina untuk menguasai dan memahami gramatikal Arab atau yang biasa mereka sebut dengan ilmu alat yang juga ditunjang oleh kurikulum ekstra dengan model kursus metode *Amtsilati*. Tujuan mempelajari gramatikal Arab tersebut ialah agar para santri dapat dengan mudah memahami teks al-Qur'an dan hadits sehingga tidak terikat dengan terjemahan saja. Selain kurikulum gramatikal Arab tersebut, para santri juga diarahkan untuk mempelajari berbagai instrumen keilmuan lainnya untuk memahami agama dengan baik dan benar misal tafsir, hadis, ushul fiqih, tauhid, fiqih praktis dan lain sebagainya.

2. Pondok Pesantren Makarim al-Akhlaq

Pondok Pesantren Makarim al-Akhlaq didirikan secara resmi pada tahun 1997 oleh al-Habib Amin al-Hinduan dan saat ini diasuh oleh al-Habib Ali Helmi Farmadi al-Hinduan. Pondok Pesantren ini memiliki beragam unit pendidikan di dalamnya, yaitu TPQ, Madrasah Mu'adalah Makarim al-Akhlaq dan Madrasah Diniyah. Adapun jumlah santri yang bermukim di pondok pesantren tersebut saat

ini tercatat sebanyak 175 orang. Sistem pendidikan yang dijalankan oleh pondok pesantren Makarim al-Akhlaq terbagi menjadi tiga, yaitu aktivitas pendidikan pagi hari, siang hari dan malam hari. Selain di bawah binaan pengasuh al-Habib Ali Helmi Farmadi al-Hinduan, secara teknis pesantren ini dijalankan oleh seorang ustadz yang berfungsi sebagai pengawas pondok pesantren dan pelaksana perintah pengasuh, yaitu Ustadz Usaid Bari.

Mengenai strategi Pondok Pesantren Makarim al-Akhlaq dalam membendung gerakan radikalisme agama tidak diatur secara spesifik dalam bentuk pendidikan maupun kurikulum pembelajaran. Namun demikian, secara teknis pondok pesantren ini menjadi salah satu mitra pemerintah dalam menanamkan nilai-nilai deradikalisasi agama di mana pada satu waktu ada jajaran dari Kodim Singkawang yang datang menuju pesantren untuk menjelaskan tentang gerakan radikalisme agama dan upaya-upaya yang harus ditempuh oleh para santri dalam menangkal gerakan radikal tersebut.

Pondok Pesantren Makarim al-Akhlaq sendiri memiliki moto yang ditanamkan kepada para santri sejak dini, yaitu “Cinta Allah, Cinta Rasulullah dan Cinta Wali Allah”. Moto tersebut menyiratkan salah satu konsentrasi pesantren ini yang bergerak dalam bidang tasawuf. Pun begitu strategi pondok pesantren tersebut dalam membendung gerakan radikalisme agama adalah dengan cara menanamkan ajaran-ajaran sufistik dan sekaligus sebagai karakteristik utama pondok pesantren tersebut. Menurut Ustadz Usaid Bari, inti ajaran sufistik adalah menebar kasih sayang (*rahmah*) di antara sesama manusia, sehingga jika hal ini dilakukan maka tidak mungkin lahir gerakan Islam radikal yang menggunakan cara-cara dan langkah-langkah ekstrim dalam menyampaikan ajaran Islam. Ia menyatakan:

“salah satu ajaran sufi ada yang namanya ‘*uzlah*. ‘*Uzlah* ini biasanya diartikan dengan mengasingkan diri. Cuma apa *sih* tujuan ‘*uzlah* itu? Kalau yang saya dapatkan dari guru saya ya, tujuan ‘*uzlah* itu bukan agar kita selamat dari orang lain, ustadz. Tapi agar orang lain selamat dari kita, selamat dari lisan kita, selamat dari tingkah laku kita, selamat dari berbagai macam dari apa yang ada pada diri kita, ustadz.”

“Itu salah satu contoh saja *sih*, ustadz. *Lah* kalau kita berusaha agar orang lain selamat dari diri kita, tentu tidak akan ada aksi-aksi radikal, aksi-aksi ekstrem kaya terorisme itu, ustadz, karena itu tadi, kita ber‘*uzlah* agar orang selamat dari kita.”

3. Pondok Pesantren Darul Ulum

Pondok Pesantren Darul Ulum didirikan oleh salah seorang keturunan ulama besar Makkah al-Mukarramah, yakni K.H. Choiruman ar-Rahbini. Pesantren ini didirikan pada 10 Muharram 1399 atau bertepatan dengan 21 Desember 1977. Pesantren tersebut merupakan kelanjutan dari Pondok Pesantren

at-Tariqi yang lebih dulu dirintis di Sungai Segak. Pada masa awal berdirinya, jumlah santri hanya 43 orang dimana kebanyakan dari mereka merupakan santri at-Tariq. Saat ini tercatat kurang lebih ada sekitar 600 santri baik santrian maupun santriwati yang bermukim di Pondok Pesantren Darul Ulum (Tim Penulis Khazanah Ulama Nusantara, 2018).

Sejak masa awal berdirinya hingga saat ini, Pondok Pesantren Darul Ulum memiliki berbagai macam lembaga pendidikan baik dari tingkat dasar sampai ke perguruan tinggi yang berada di bawah naungan pondok pesantren. Lembaga pendidikan tersebut yaitu: Taman Kanak-kanak (TK), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) kelas *bilingual* dan *non-bilingual*, Madrasah Diniyah dan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Ulum (STITDAR). Keberadaan perguruan tinggi di pondok pesantren tersebut merupakan salah satu terobosan besar dalam sejarah pondok pesantren yang ada di Kalimantan Barat. Misi perguruan tinggi STITDAR yakni menyebarkan Islam ala *Ahlu Sunnah Wal Jama'ah* (Tim Penulis Khazanah Ulama Nusantara, 2018).

Dalam konteks membendung gerakan radikalisme agama di pondok pesantren ini tidak jauh berbeda dengan misi yang dikembangkan oleh perguruan tinggi di pesantren tersebut, yakni menanamkan ajaran *Ahlu Sunnah Wal Jama'ah* kepada para santri. Penanaman nilai-nilai *Ahlu Sunnah Wal Jama'ah* tersebut langsung ditangani oleh pengasuh pondok langsung, yakni di bawah binaan KH. Choiruman ar-Rahbini. Pengajian *Ahlu Sunnah Wal Jama'ah* ini dilaksanakan setiap malam Sabtu yang bertempat di depan *ndalem* pengasuh. Kegiatan ini hanya diikuti oleh santrian dan santriwati yang sudah menginjak kelas III Aliyah. Pembelajaran tentang *Ahlu Sunnah Wal Jama'ah* ini merupakan pengenalan terhadap sekte-sekte yang berkembang dalam Islam sejak masa *tabi'in*. Tujuan dikenalkan berbagai macam sekte tersebut agar para santri Pondok Pesantren Darul Ulum dapat memahami dengan baik dan benar tentang sekte-sekte yang menyimpang, baik penyimpangannya tersebut dimotori oleh pola pemikiran suatu sekte maupun karena dimotori oleh gerakan suatu sekte yang ekstrem dalam menentang ajaran Islam. Salah satu alumni pondok pesantren Darul Ulum, Ruba'i, menyatakan:

“Pelajaran tentang *ahlu sunnah wal jama'ah* itu ya pelajaran tentang sekte-sekte ya, tentang *firqah-firqah* dalam Islam. Karena memang banyak sekali kelompok dalam Islam ini yang sudah ada sejak masa sahabat, yaitu masa Imam Ali. Saat itu kan terjadi perang, itu namanya kalau tidak salah perang *Siffin* ya, antara pihak Imam Ali dengan pihak Muawiyah. Itulah awal mula titik perpecahan Islam. Ya, sebenarnya ini *sunnatullah sih, kan* sudah disabdakan oleh Nabi kalau umatnya akan pecah jadi 73 kelompok.”
“Salah satunya itu ketika Islam pecah muncul itu kelompok yang menamakan dirinya Khawarij. Kelompok ini tidak mendukung Imam Ali juga tidak mendukung Muawiyah. Menurut kelompok ini yang lain itu

kafir karna tidak menjalankan hukum Allah. Nah, kalau kata saya *sih*, sekarang itu banyak bermunculan faham-faham yang hampir sama dengan Khawarij. Liat *amaliah* orang dikit-dikit bilang kafir, dikit-dikit bilang syirik, dikit-dikit bilang bid'ah.”

Sebagaimana diketahui bersama, kehadiran gerakan radikal ini tidak dapat dilepaskan dari pola pemahaman yang jumud dan tekstual dalam mengaplikasikan pesan-pesan Islam, baik al-Qur'an maupun hadits. Kehadiran pembelajaran *Ahlu Sunnah Wal Jama'ah* ini untuk menghindari para santri Pondok Pesantren Darul Ulum terjebak pada pola pikir yang tektualis dan parsial. Pelajaran *Ahlu Sunnah Wal Jama'ah* yang diajarkan di Darul Ulum tersebut merujuk pada buku dengan judul *Ahlu Sunnah Wal Jama'ah* yang ditulis langsung oleh pengasuh pondok pesantren Darul Ulum, KH. Choiruman ar-Rahbini.

4. Pondok Pesantren Darussalam

Pondok Pesantren Darussalam didirikan pada 25 Juli 1992 Masehi atau bertepatan dengan 24 Muharram 1413 Hijriah. Pondok Pesantren ini didirikan oleh tiga tokoh penting pondok pesantren ini, yaitu H. M. Yunus Nazam, H. Abdullah Ali'e dan KH. Tusirana Rasyid. Adapun posisi pimpinan pondok pesantren berada di bawah pimpinan KH. Tusirana Rasyid dengan dibantu oleh Ustadz H. Yusdiansyah dan Ustadz Muhrodji selaku wakil atau *badal* Kiai. Berdirinya Pondok Pesantren Darussalam diawali oleh kegelisahan yang dialami oleh masyarakat sekitar karena minimnya lembaga pendidikan dengan model pesantren di daerah Mempawah. Berdasarkan alasan tersebut maka diputuskanlah untuk membangun pondok pesantren yang diberi nama Pondok Pesantren Yayasan Darussalam di bawah naungan Yayasan Darussalam. Pada awal mula berdirinya, santri pertama yang bermukim di pondok pesantren tersebut hanya 17 orang, saat ini jumlah santri sudah mencapai 710 orang dan memiliki ribuan alumni.

Pondok Pesantren Darussalam Sengkubang saat ini memiliki berbagai macam lembaga pendidikan baik formal dan non-formal. Adapun lembaga pendidikan formal mulai dari tingkat Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah. Adapun lembaga pendidikan non-formal meliputi Taman Pendidikan al-Qur'an, Tahfidz al-Qur'an dan Taman Pendidikan Keterampilan. Adapun kegiatan para santri yang berlangsung di Pondok Pesantren Darussalam dimulai sejak menjelang waktu subuh sampai jam 22.00.

Dalam konteks penelitian ini, strategi yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Darussalam Sengkubang dalam membendung aksi radikalisme agama, sebagaimana dijelaskan oleh salah seorang ustadz di pondok pesantren tersebut, adalah dengan cara menebar Islam yang *rahmatan li al-'alamin*. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari visi dan misi pesantren ini adalah menjadikan Islam sebagai *way*

of life dan *rahmatan li al-'alamin*. Pada level implementasi visi misi tersebut mendorong Pondok Pesantren Darussalam untuk membangun satu model pendidikan Islam yang memiliki orientasi pada sikap plural dan toleran dalam memandang perbedaan karena santrinya juga berasal dari berbagai etnis. Perbedaan etnis tersebut menjadi tuntutan bagi pondok pesantren terkait untuk membangun jiwa plural dan toleran, tidak hanya dalam konteks etnis saja melainkan juga dalam konteks praktik dalam beragama. Menegaskan hal di atas, Ustadz Arif menyatakan dalam kesempatan wawancara dengan penulis:

“kalau kita lihat sebenarnya akar gerakan radikal itu adanya pemahaman yang tidak toleran. Kadang kita tahunya A, orang pakai yang B, jadi seakan-akan yang B itu salah. *Kan* tidak demikian seharusnya.”

“Jadi seperti tadi itu, kalau ingin menanggulangi gerakan radikal, faham radikal, salah satunya caranya adalah dengan cara bersikap toleran. Kami di sini menanamkan itu pada para santri, para santri di sini harus mampu bersikap toleran antar sesama, para santri harus memiliki sikap pluralis dalam memandang perbedaan. Apalagi kaya tempat kita ini, multi etnis, multi budaya, kalau tidak mengedepankan sikap toleran dan pluralis, konflik etnis yang telah mewarnai kehidupan masyarakat Kalbar ini bisa mendorong lahirnya faham-faham radikal. Si A itu non-Muslim, kafir itu. Si B ini pembunuh Muslim, kafir itu dan seterusnya.”

E. Membaca Strategi Pondok Pesantren di Kalimantan Barat dalam Paradigma AGIL

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian pendahuluan penelitian ini, penulis akan melihat strategi yang dikembangkan oleh keempat pesantren tersebut dalam bingkai teori struktural fungsionalisme (Marzali, 2006) yang mengacu pada paradigma AGIL Talcott Parsons, yaitu adaptasi (*adaptation*), pencapaian tujuan (*goal attainment*), integrasi (*integration*) dan pemeliharaan pola (*latency*). *Pertama*, adaptasi yang dimaksud oleh Parsons adalah sebuah sistem yang sedang berjalan harus mampu merespon situasi eksternal yang gawat. Selain itu, sebuah sistem juga harus mampu menyesuaikan dengan lingkungannya. *Kedua*, pencapaian tujuan yang dimaksud Parsons merupakan suatu usaha yang mengacu pada gambaran sistem aksi dalam menetapkan tujuan, memotivasi dan memobilisasi segala hal dalam sistem untuk mencapai tujuan yang diinginkan. *Ketiga*, integrasi dalam satu kesatuan sistem menurut Parsons adalah upaya pemeliharaan ikatan dan solidaritas, dengan melibatkan segala elemen untuk mengontrol, memelihara sub-sistem, dan mencegah gangguan utama dalam sistem. *Keempat*, pemeliharaan pola yang dimaksudkan oleh Parsons adalah suatu sistem harus mampu melengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik menyangkut motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi (Ritzer & Goodman, 2006; Hamilton, 2001).

Dalam konteks peran fungsional pondok pesantren dalam mencegah gerakan radikalisme agama tersebut dapat dijabarkan ke dalam beberapa hal. *Pertama*, dalam

konteks adaptasi pondok pesantren yang ada di Kalimantan Barat, belum memiliki respon yang begitu kuat terhadap gerakan radikalisme. Hal tersebut dapat dilihat dari statemen yang diungkapkan ketua pengurus Pondok Pesantren Makarim al-Akhlaq:

“Kalau bagi kami di sini, kami tidak tahu menahu soal adanya gerakan radikal semacam itu. Kami di sini menjaga para santri kami agar tidak berhubungan dengan isu-isu yang ada di luar sana karena memang tugas santri yang belajar. Tapi memang pernah ada di sini sosialisasi dari Kodim Singkawang.”

Berbeda dengan pandangan yang dikemukakan oleh pengurus Pondok Pesantren Makarim al-Akhlaq, salah seorang ustadz di Pondok Pesantren Darul Khairat malah memberikan perhatian serius terhadap lahirnya gerakan radikalisme agama ini. Menurut Ustadz Atoullah:

“Lahirnya gerakan radikal yang mengatasnamakan agama itu tetap tidak bisa dilepaskan dari pemahaman akan agama itu sendiri *kan*. Jadi, bagi kami sendiri, tugas kami di sini adalah mendidik para santri untuk belajar, untuk memahami agama dengan baik dan benar. Kalau pemahaman agamanya tidak baik dan benar, ya berarti ada yang salah *kan* dengan pemahaman agamanya. Biasanya orang yang salah memahami agama itu orang-orang yang hanya belajar agama dari kulitnya saja, dari sampulnya saja. Tidak melihat lebih mendalam, tidak mempelajari lebih jauh. Caranya ya dengan cara belajar cara-cara ulama memahami agama, membaca dan merenungkan pemikiran para ulama *salafus shalih* seperti dalam kitab-kitab kuning itu. Saya kira dengan ini maka orang akan terbebas dari kesalahan dan kedangkalan dalam memahami agama.”

Kedua, dalam konteks mencapai tujuan. Setiap pesantren mempunyai tujuan yang berbeda-beda tergantung pada sumber daya yang dimiliki oleh pondok pesantren tersebut. Pondok Pesantren Makarim al-Akhlaq, misalnya, memiliki tujuan yang lebih menekankan pada internalisasi nilai-nilai sufistik. Pondok Pesantren Darul Ulum memiliki tujuan agar para santri mampu menginternalisasikan nilai-nilai *ahlu sunnah wa al-jama'ah*. Pondok Pesantren Darussalam Sengkubang memiliki tujuan agar para santri memiliki sikap toleran dan pluralis. Terakhir, Pondok Pesantren Darul Khairat memiliki tujuan agar para santri mampu memiliki pemahaman keagamaan yang mendalam yang ditempa melalui pendidikan Madrasah Diniyah. Namun demikian, keempat tujuan yang berbeda tersebut memiliki sinergisitas dalam membendung gerakan radikalisme agama.

Ketiga, dalam hal integrasi antar sistem. Sistem yang berkembang di dalam pondok pesantren pada umumnya, jabatan pimpinan biasanya melekat pada pengasuh utama pondok pesantren, mulai dari mengurus santri, mengatur pembangunan pesantren, mengelola keuangan pesantren dan lain sebagainya. Hanya saja dalam praktiknya, ada beberapa ustadz di pondok pesantren yang bertugas membantu Kiai.

Hal semacam itu bisa dilihat dari ketiga pondok pesantren yang ada, Pondok Pesantren Makarim al-Akhlaq, Pondok Pesantren Darul Khairat dan Pondok Pesantren Darul Ulum. Integrasi yang tampak berbeda bisa dilihat dari Pondok Pesantren Darussalam Sengkubang. Pondok pesantren tersebut memiliki dikotomi yang jelas antara tugas yayasan selaku pengelola manajemen urusan keuangan dan kelembagaan, dan pengasuh pesantren yang bertugas mengurus pendidikan di pesantren. Masing-masing kepengurusan tidak boleh merangkap jabatan. Namun, dari kedua model integrasi tersebut tidak mengurangi langkah-langkah strategis pondok pesantren dalam membendung arus radikalisme agama. Hal ini disebabkan oleh faktor menyatunya sistem pendidikan pesantren yang padu, di mana visi-misi, kurikulum dan tujuan pesantren menjadi orientasi yang dijalankan oleh segenap civitas pesantren, baik di kalangan *asatidz*, guru dan santri.

Keempat, dalam konteks menjaga pola pemeliharaan. Dalam proses menjaga dan memelihara strategi tersebut mengalami perbedaan di antara keempat pesantren tersebut. Strategi yang dikembangkan oleh tiga pesantren, yaitu Pondok Pesantren Makarim al-Akhlaq, Pondok Pesantren Darussalam Sengkubang, dan Pondok Pesantren Darul Khairat terus konsisten sampai saat ini. Bahkan strategi yang dianggap mampu membendung radikalisme agama tersebut terus dilakukan improvisasi menuju hasil yang lebih baik. Adapun strategi yang dijalankan oleh Pondok Pesantren Darul Ulum dengan model pembelajaran *ahlu sunnah wa al-jama'ah* yang langsung diampu oleh pimpinan pondok pesantren, KH. Choiruman ar-Rahbini, tidak terjaga sampai saat ini. Salah satu alasannya, menurut Ruba'i, bisa saja karena faktor kondisi usia pengasuh yang sudah cukup sepuh sehingga tidak bisa lagi mengampu pelajaran tersebut. Secara sederhana, strategi AGIL dari keempat pesantren tersebut dapat gambarkan pada [tabel 1](#) berikut:

Tabel 1. Penerapan Strategi AGIL dalam Menangkal Radikalisme

AGIL	PP. Makarim al-Akhlaq	PP. Darussalam	PP. Darul Khairat	PP. Darul Ulum
<i>Adaptation</i>	√	√	√	√
<i>Goal attainment</i>	√	√	√	√
<i>Integration</i>	√	√	√	√
<i>Latency</i>	√	√	√	x

KESIMPULAN

Perkembangan kasus radikalisme atas nama agama di Kalimantan Barat dapat dilihat dalam dua kasus, yaitu kasus penyerangan terhadap anggota Gerakan Fajar Nusantara pada tahun 2016 di daerah Mempawah dan kasus persekusi dan penghinaan ulama yang dilakukan Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Sintang Kalimantan Barat yang berbuntut lahirnya gerakan Aksi Bela Ulama 205. Strategi yang dilakukan oleh pondok pesantren di Kalimantan Barat dalam membendung arus gerakan radikalisme agama dapat dijabarkan sebagai berikut. *Pertama*, dengan menggunakan strategi

internalisasi ajaran sufistik yang dilakukan Pondok Pesantren Makarim al-Akhlaq. *Kedua*, menjadikan pendidikan *genuine* pondok pesantren yang berupa pendidikan *salaf* dengan model pendidikan Madrasah Diniyah sebagai tameng menghadapi paham radikal sebagaimana yang dijalankan oleh Pondok Pesantren Darul Khairat. *Ketiga*, menanamkan doktrin *Ahlu Sunnah wa al-Jama'ah* seperti yang diadopsi oleh Pondok Pesantren Darul Ulum. *Keempat*, dengan cara menanamkan nilai-nilai toleransi dan sikap pluralis sebagaimana yang dinyatakan oleh Pondok Pesantren Darussalam Sengkubang.

Lebih lanjut, pembacaan strategis Pesantren di Kalimantan Barat dalam paradigma AGIL disimpulkan bahwa Pesantren Makarim al-Akhlaq, Darussalam, dan Darul Khairat sudah menerapkan *Adaption, Goal Attainment, Integration*, dan *Latency*. Sedangkan pesantren Darul Ulum sudah menerapkan *Adaption, Goal Attainment*, dan *Integration* minus *Latency*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Baqi, M. A. (1992). *Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Quran*. Beirut: Dar al-Hadits.
- Al-Faqir, A. (2016, 9 Oktober). BNPT sebut ada 19 Pesantren. *Merdeka.com*. Diambil dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/kepala-bnpt-sebut-ada-19-pesantren-terindikasi-radikal.html>
- Al-Zastrouw. (2004). *Gerakan Islam Simbolik: Politik Kepentingan FPI*. Yogyakarta: LKiS.
- Asrori, A. (2015). Radikalisme di Indonesia: Antara Historisitas dan Antropisitas. *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 9(2), 253-268.
- Azra, A. (2016). *Transformasi Politik Islam: Radikalisme, Khilafatisme, dan Demokrasi*. Yogyakarta: Prenadamedia Group.
- Bakri, S. (2014). Islam dan Wacana Radikalisme Agama Kontemporer. *Jurnal Dinika*, 3(1), 23.
- Hanafi, Y. (2018, 10 Oktober). Model Pendidikan Pesantren yang Toleran dan Inklusif Berbasis Culture of Peace Education Sebagai Upaya Mengikis Radikalisme atas Nama Agama. <http://lp3.um.ac.id/>
- Hasan, N. (2016). *Violent Activism, Islamist Ideology, and the Conquest of Public Space among Youth in Indonesia*. in *Youth Identities and Social Transformations in Modern Indonesia*. Leiden: Brill.
- Hasani, I., & Naipospos, B. T. (2012). *Dari Radikalisme Menuju Terorisme: Studi Relasi dan Transformasi Organisasi Islam Radikal di Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta*. Jakarta: Setara Institute.
- Humaidi, M. A. (2008). Islam dan Kristen di Pedesaan Jawa: Kajian Politik Sosial Keagamaan dan Ekonomi Politik di Pedesaan Pegunungan Dieng. *Masyarakat Indonesia: Majalah Ilmu-ilmu Sosial Indonesia*, 34(1).
- Kepolisian Mendata Ada 17 Orang Terkait ISIS di Kalimantan Barat. (2017, 20 Agustus). Diambil 20 Januari 2020, dari Tempo.Co website: <https://nasional.tempo.co/read/872132/kepolisian-mendata-ada-17-orang-terkait-isis-di-kalimantanbarat>

- Komnas HAM RI. (2017). Pada 2016, Intoleransi Meningkat. *Kabar Latharary KOMNAS HAM RI*. Diambil dari <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2017/01/16/276/pada-2016-intoleransi-meningkat.html>
- Mahfudh, S. (1994). *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: LKiS.
- Maunah, B. (2009). *Tradisi Intelektual Santri dalam Tantangan dan Hambatan Pendidikan Pesantren di Masa Depan*. Yogyakarta: Teras
- Marzali, A. (2006). Struktural-Fungsionalisme. *Antropologi Indonesia*, 30(2), 127-137.
- Muhajir. (2014). Pesantren sebagai Institusi Pendidikan Islam. *Saintifika Islamica*, 1(2), 5-11.
- Mukodi. (2015). Pesantren dan Upaya Deradikalisasi Agama. *Walisongo*, 23(1), 89-112.
- Najib, M. N. (2013). Konstruksi Identitas Keagamaan (Studi tentang Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki dengan Masyarakat Lokal). *Konferensi Ikatan Sosiolog Indonesia*.
- Panikkar, R. (1994). *Dialog Intra Religius*. Yogyakarta: Kanisius.
- Panji, A., & Antara. (2016, 19 Januari). Mengamuk, Massa Bakar Pemukiman Eks Gafatar di Mempawah. *CNN Indonesia*. Diambil dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160119231934-20-105426/mengamuk-massa-bakar-pemukiman-eks-gafatar-di-mempawah>
- Parsons, T., & Hamilton, P. (2001). *Reading from Talcott Parsons*. London: Methuen.
- Rahman, I. (2006). *Arus Baru Islam Radikal, Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2006). *Teori Sosiologi Modern*. Yogyakarta: Pranada Media.
- Sachedina, A. (2004). *Beda tapi Setara: Pandangan Islam tentang Non-Islam*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Saleh, A. R. (1988). *Pedoman Pembinaan Pondok Pesantren*. Jakarta: Pedoman Pembinaan Pondok Pesantren.
- Shawi, S. (1993). *At-Tatharruf ad-Diniy*. Kairo: al Afaq ad Dauliyah li al 'ilam.
- Sinaga, O., Ramelan, P., & Montratama, I. (2008). *Terorisme Kanan Indonesia: Dinamika dan Penanggulangannya*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sitepu, M. (2017, 22 Mei). Aksi bela ulama di Kalbar 'tiru' politik SARA Pilkada Jakarta. *BBC Indonesia*. Diambil dari <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39992156>
- Sulma, Z. I. A. (2008). *Diwan Zuhair bin Abi Sulma*. Beirut: Dar Sader.
- Suprihatiningsih. (2012). Spiritualitas Gerakan Radikalisme Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 32(2), 367-380.
- Susanto, E. (2007). Kemungkinan Munculnya Paham Islam Radikal di "Pondok Pesantren". *Tadrîs: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 1-19.
- Syarif, N. (2010). Jihad dan Radikalisme dalam Perspektif Sejumlah Pimpinan Pesantren di Jawa Barat. *Jurnal Penelitian Keislaman*, 6(2), 339-360.
- Tan, C. (2011). *Islamic Education and Indoctrination: The Case in Indonesia*. New York: Routledge.

- Tim Cahaya Nabawi. (2017). Radikalisme Kelompok Liberal. *Majalah Dakwah Islam Cahaya Nabawi*, 157.
- Tim Penulis Khazanah Ulama Nusantara. (2018). *Menyulap Hutan Menjadi Kota Ilmu: Riwayat Hidup dan Perjuangan KH. Choiruman ar-Rahbini*. Jakarta: Risalah Nusantara.
- Ummah, S. C. (2012). Akar Radikalisme Islam di Indonesia. *Humanika*, 12(1), 112-124.
- Utsman, I. S. (2017). at-Tatharruf wa at-Ta'ahub ad-Diny: Asbaabuhu wa 'Awamil al-Muadayah Ilaahi. *Majallah al-Libiyah al-Alamiyah Kuliyyah at-Tarbiyyah*, 28.
- Wahid, A. (2001). *Menggerakkan Tradisi: Esai-esai Pesantren*. Yogyakarta: LKiS.
- Wahid Institute. (2017, Agustus). <http://www.wahidinstitute.org/wi-id/images/upload/dokumen/laporan%20kbb%202014%20%20the%20wahid%20institute.pdf>
- Yasmadi. (2002). *Modernisasi Pesantren, Kritik Nurcholish Madjid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional*. Jakarta: Ciputat Press.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
